

NOTULEN
RAPAT EVALUASI PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Rapat Evaluasi Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2024, Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten, dipimpin oleh Sekretaris Dinas Ahmad Ridwan, SE. M.Si, dihadiri oleh Pejabat Esselon 3, 4 dan Pejabat Fungsional. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si. telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 82,00 dengan Kategori "A" (Memuaskan) yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen, dengan hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (bobot 100 %) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan atas dokumen perencanaan kinerja yang telah terpenuhi secara berturut-turut dalam kurun 5 tahun, yaitu:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
- b) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- c) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- d) Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
- e) Rencana Aksi Tahun 2023;
- f) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023;
- g) Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2. Kondisi dari sub komponen ini adalah beberapa indikator kinerja telah memenuhi kriteria dalam kualitas perencanaan kinerja dan telah memenuhi standar dengan ukuran kinerja yang SMART, namun masih terdapat indikator kinerja program yang mengalami perubahan dalam 1 periode Perencanaan Strategis dan beberapa indikator dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang kurang tepat

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini terlihat pada penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023 -2026, dimana target per sub kegiatan menggunakan baseline data capaian pada tahun sebelumnya dan berlanjut pada tahapan perencanaan berikutnya;
- Terdapat beberapa kriteria pemanfaatan perencanaan kinerja dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan sudah terpenuhi, kondisi tersebut dapat diurai sebagai berikut :
 1. Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (lampiran perjanjian kinerja) sudah selaras dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD/renstra
 2. Dokumen renja telah menuangkan capaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra dan sudah menuangkan capaian target kinerja program dan kegiatan.

2. PENGUKURAN KINERJA

Komponen Pengukuran Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 24,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A sehingga nilainya adalah sebesar 5,4. Sudah memiliki tim pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dalam bentuk SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dan SOP Tentang Pengumpulan data kinerja

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2.

Kriteria pada sub komponen ini telah terpenuhi dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu setiap bulan melalui rekonsiliasi capaian SAKIP dengan Bappeda Provinsi Banten

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Terdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi pada sub komponen ini yaitu :

1. Pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam penetapan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
2. Refocusing organisasi telah dilakukan namun tidak berdasarkan atas pengukuran kinerja tetapi berdasarkan perubahan peraturan
3. Strategi pencapaian kinerja belum didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja
4. Kebijakan pencapaian kinerja belum didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja
5. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar pemberian reward dan punishment, penilaian SAKIP masih bersifat permisif dan fleksibel

3. PELAPORAN KINERJA

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 15, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 12,30 dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 3 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 2,7.

Dalam dokumen laporan telah menggambarkan kinerja yang dilakukan antara lain berupa capaian yang telah didapatkan, pelaksanaan evaluasi tahun sebelumnya dan pengukuran kinerja.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Sub komponen ini memiliki bobot 4,50 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 3,6

Telah memenuhi standart dengan :

1. LKIP telah menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja program tahun 2022 dengan target capaian tahun 2023 pada periode renstra
2. LKIP telah menyajikan perbandingan capaian indicator kinerja program dan kegiatan tahunan 2022 dan 2023.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Sub komponen ini memiliki bobot 7,50 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Pelaporan Kinerja memberikan dampak dalam penyesuaian kebijakan, misalnya, hasil capaian kinerja yang tidak linear pada Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan, menjadi salah satu dasar usulan perubahan nomenklatur SOTK. Namun terdapat juga beberapa kriteria yang tidak terpenuhi pada sub komponen ini yaitu :

1. LKIP belum digunakan dalam penajaman perencanaan kinerja pada tahun berikutnya
2. LKIP kinerja telah menginformasikan upaya organisasi dalam melaksanakan hasil evaluasi capaian kiera melalui rencana aksi namun belum berpengaruh signifikan terhadap budaya kinerja organisasi.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 20,5 dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Sub komponen ini memiliki bobot 5 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,5.

Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai mandat kebijakan.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Sub komponen ini memiliki bobot 7,50 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun belum ada upaya yang bisa dihargai dan tidak ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan dengan perangkat daerah lain.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 12,50 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 10. Terdapat beberapa kriteria yang tidak dipenuhi pada sub komponen ini yaitu : tidak terdapat bukti dukung penyampaian hasil tindak lanjut atas pemantauan dan supervisi yang dilaksanakan oleh tim evaluasi capaian SAKIP sehingga berdampak pada :

1. Tidak dapat mengukur seberapa besar peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal
2. Hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian Notulensi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 12 Februari 2024

Notulen



Neni Widiastuti, S.Sos

NIP. 197502282003122002